



# LAPORAN PELAKSANAAN UJI PETIK TW 2

## OSP 9 SULAWESI TENGAH 2019



## KATA PENGANTAR

Uji petik Triwulan II tahun 2019 untuk memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan KOTAKU pada tahap persiapan dan Perencanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan di lokasi BPM TA 2019 Yaitu Kab. Poso Kelurahan Gebang Rejo.

Data yang terkumpul dan dijadikan bahan analisis dalam dokumen laporan uji petik Triwulan II tahun 2019 ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Dari Tim OSP 9 Sulteng dan Tim Korkot Kota Palu dan Pokja PKP Kab. Poso. Untuk itu diucapkan terima kasih.

Hasil uji petik ini juga menemukan sejumlah hal yang memerlukan perbaikan segera untuk dokumen DED. Termasuk memerlukan klarifikasi untuk memastikan kebenaran faktual yang terjadi dilapangan.

Semoga laporan ini memberi efek perbaikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan kawasan kumuh Kab. Poso

Wassalam

Palu , 31 Juli 2019

Oversight Service Provider (OSP) 9

Provinsi Sulawesi Tengah



**Tasrif Siara**  
Team Leader



## A. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi dengan pembangunan platform Kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU ditopang oleh sebuah sistem organisasi yang solid mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Konsep KOTAKU pada intinya adalah untuk mewujudkan kota menuju layak huni dan berkelanjutan dan untuk mencapainya dalam keberjalanannya perlu dilakukan adanya perubahan atau *reform*. Konsep *reform* Program KOTAKU kedepan, kita akan melaksanakan program melalui pendekatan skala kawasan yang terintegrasi dengan skala lingkungan, melakukan penanganan permukiman kumuh melalui pendekatan “satu data”, “satu perencanaan” dan “satu peta untuk semua, serta menguatkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan dengan adanya reformasi ini kita dapat mencapai target pengurangan luas kumuh, dapat merubah wajah permukiman, dan memperoleh infrastruktur terbangun yang berkualitas, berfungsi dan terpelihara.

Dalam pengendalian Program dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu (a) menyusun perencanaan atau *planning*; (b) melaksanakan koordinasi atau *coordinating* dan (c) melakukan supervisi atau *supervision* dan (d) melaksanakan monitoring dan evaluasi atau *monev*. Melalui empat kegiatan utama tersebut di atas, diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan program, termasuk pencapaian tujuan dan target program dapat dijamin kualitasnya (*Quality Assurance*) dan dapat dikendalikan kualitasnya (*Quality Controll*). Diantara kegiatan penting dalam rangka menjamin dan mengendalikan kualitas pelaksanaan program NSUP-KOTAKU adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Monitoring (Pemantuan) dilaksanakan mulai dari pendataan (baseline); perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap keberlanjutan program. Kegiatan monitoring dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya (a) pengamatan melalui MIS-Website; (b) pelaporan kegiatan baik bulanan maupun triwulan; (c) rapat-rapat koordinasi; (d) pengamatan kegiatan langsung dilapangan melalui uji petik (*spot check*).



## Kemajuan Perkembangan KOTAKU

Dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan tiga lokasi kegiatan KOTAKU yaitu :Kota Palu 45 Kel, Kab Poso 4 Kel dan Kab Tolitoli 9 Kelurahan, dengan Katagori Lokasi BPM terdiri dari 3 Kel dan Non BPM 55 Kel. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah capaian target nasional tersebut memilih Kota Palu dengan target penanganan pengurangan kumuh *seluas 85,16 Hektare. Yang terdapat di 14 Kelurahan.* Sedangkan berdasarkan SK Kumuh yang telah di terbitkan dengan penetapan lokasi Flag 1, target penanganan pengurangan kumuh Sulawesi Tengah seluas 237,66 Ha. Capaian pengurangan Kumuh di awal tahun 2019 seluas 127,89 Ha. Untuk Kota Palu yang menjadi target Nasional RPJMN dari 85,16 Ha telah tertangani seluas 73,93 Ha, Luasan kumuh yang masih tersisa untuk kota Palu seluas 11,23 Ha.

Untuk Kota Palu di samping menjadi target pengurangan Kumuh juga menjadi target penanganan kebencanaan melalui program Contingency Emergency Respond Component (CERC)

Perkembangan pelaksanaan kegiatan KOTAKU jika merujuk pada capaian *Key Performance Indikator* (KPI), untuk Sulawesi Tengah masih mengacu pada perhitungan capaian KPI tahun 2018. Hasil perhitungan KPI telah memperlihatkan hasil, walau belum sepenuhnya seluruh indikator hasil dapat dikatakan tercapai, Indikator target dan capaian KPI (KOTAKU) tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : Target dan capaian KPI KOTAKU Sulawesi Tengah**

| NO.                    | INDIKATOR   | TARGET DAN CAPAIAN KPI |         |        |         |
|------------------------|---|------------------------|---------|--------|---------|
|                        |   | 2017                   |         | 2018   |         |
|                        |   | Target                 | Capaian | Target | Capaian |
| <b>INDIKATOR HASIL</b> |   |                        |         |        |         |
| 1                      | Masyarakat di kawasan kumuh yang mendapat perbaikan/ peningkatan pembangunan infrastruktur    | 11.624                 | 18.847  | 34.985 | 97.444  |
| 2                      | Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses air bersih                               | 979                    | 56      | 2.895  | 8.208   |
| 3                      | Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak                           | 1.468                  | 205     | 4.343  | 12.312  |
| 4                      | Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses jalan sepanjang waktu dalam radius 500 m | 4.527                  | 10.869  | 13.391 | 37.956  |



| NO.   | INDIKATOR  | TARGET DAN CAPAIAN KPI |         |        |         |
|---|--|------------------------|---------|--------|---------|
|   |  | 2017                   |         | 2018   |         |
|   |  | Target                 | Capaian | Target | Capaian |
| 5   | Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan persampahan   | 1.835                  | 45      | 5.429  | 15.391  |
| 6   | Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan draenase  | 4.405                  | 6.956   | 13.029 | 36.932  |
| 7   | Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani  | 36,38                  | 56,69   | 146    | 127,89  |
| 8   | Persentase masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh merasa puas terhadap kualitas dan pelayanan pembangunan infrastruktur perkotaan       |                        |         |        |         |
| 9   | Persentase pengaduan masyarakat tertangani dan selesai   | 80%                    | 100%    | 80%    | 100%    |
| 10  | Pokja PKP tingkat Kab/Kota dan Provinsi terbentuk dan berfungsi  | 30%                    | 100%    | 70%    | 90%     |
| 11  | Jumlah penerima manfaat langsung program   | 11.869                 | 24.244  | 36.192 | 99.506  |
| 12  | Jumlah penerima manfaat perempuan program  | 6.528                  | 12.354  | 19.905 | 54.734  |
| <b>INDIKATOR HASIL ANTARA :</b>   |  |                        |         |        |         |
| <b>Komponen-1 : Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan</b>  |  |                        |         |        |         |
| 1   | Pokja PKP tingkat nasional terbentuk dan berfungsi   |                        |         |        |         |
| 2   | Tersedianya database/Profil kawasan permukiman kumuh   | Ya                     | Ya      | Ya     | Ya      |
| <b>Komponen-2 : Dukungan perencanaan terintegrasi and Penguatan kapasitas bagi Pemda dan Masyarakat</b> |  |                        |         |        |         |
| 1   | Persentase pemda yang telah menyelesaikan dokumen SIAP/RP2KP-KP dan telah disahkan oleh Bupati/Walikota                                  | 30%                    | 33%     | 70%    | 67%     |
| 2   | Persentase kelurahan yang telah menyelesaikan dokumen RPLP dan telah dikonsolidasikan kedalam dokumen SIAP/RP2KP-KP                      | 50%                    | 100%    | 80%    | 100%    |
| <b>Komponen-3 : Infrastruktur Perkotaan dan pelayanan di Kota Prioritas</b>                             |  |                        |         |        |         |
| 1   | Jumlah kota yang telah menyelesaikan 80% pembangunan infrastruktur primer dan sekunder dan pelayanan yang terhubung dengan kawasan kumuh | -                      | -       | -      | -       |



| NO.   | INDIKATOR   | TARGET DAN CAPAIAN KPI |         |        |         |
|---|---|------------------------|---------|--------|---------|
|   |   | 2017                   |         | 2018   |         |
|   |   | Target                 | Capaian | Target | Capaian |
| 2   | Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% pembangunan infrastruktur tersier dan pelayanan di kawasan kumuh          | 23                     | 12      | 25     | 16      |
| 3   | Persentase infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik   | 90%                    | 100%    | 95%    | 60%     |
| 4   | Persentase infrastruktur yang dibangun berfungsi baik   | 90%                    | 100%    | 90%    | 60%     |
| <b>Komponen-4 : Dukungan pelaksanaan dan Bantuan Teknis</b> |   |                        |         |        |         |
| 1   | Persentase pemda yang memiliki struktur monitoring dan mengembangkan sistem informasi pelaksanaan proyek secara teratur | 40%                    | 100%    | 70%    | 80%     |
| 2   | Persentase kelurahan yang telah melaksanakan audit keuangan tahunan   | 85%                    | 100%    | 90%    | 0%      |

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa hasil perhitungan capaian KPI tahun 2018 dari 12 indikator Hasil, 11 indikator melebihi target 2018 hanya 1 indikator yang tidak sesuai target yaitu Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani dari target 146 H, yang tertangani 127,6 Ha. Realisasi Serapan DIPA Kota/Kab Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) TA 2019 belum ada Penyerapan Dana, hal ini di sebabkan karena untuk Kab. Toli-toli dan Kab. Poso mengusulkan perubahan Tim Pejabat Inti Satker PIP kabupaten dan sampai dengan akhir Juni 2019 belum terbit SK Satker PIP kabupaten. Rencana Penyerapan dana DIPA Kabupaten tahap I 70% senilai Rp. 3.150.000.000,-. Rencana penyerapan dana DIPA Kabupaten dapat di gambarkan pada tabel berikut:



**Tabel : Lokasi, Alokasi dan Rencana Penyerapan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU TA. 2019, Propinsi Sulawesi Tengah.**

| No                          | Kabupaten     | Kelurahan   | Pagu BPM (Rp)        | Alokasi DIPA (Rp)    | Rencana Penyerapan Dana BPM (Rp) |
|-----------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1                           | Kab. Poso     | Gebang Rejo | 1.500.000.000        | 1.500.000.000        | 1.050.000.000                    |
| <b>Jumlah Kab. Poso</b>     |               |             | <b>1.500.000.000</b> | <b>1.050.000.000</b> | <b>1.050.000.000</b>             |
| 2                           | Kab. Tolitoli | Baru        | 1.500.000.000        | 1.500.000.000        | 1.050.000.000                    |
| 3                           | Kab. Tolitoli | Tuweley     | 1.500.000.000        | 1.500.000.000        | 1.050.000.000                    |
| <b>Jumlah Kab. Tolitoli</b> |               |             | <b>3.000.000.000</b> | <b>3.500.000.000</b> | <b>2.100.000.000</b>             |
| <b>Jumlah Sulteng</b>       |               |             | <b>4.500.000.000</b> | <b>4.500.000.000</b> | <b>3.150.000.000</b>             |

Untuk kegiatan BPM tahun anggaran 2019, sampai dengan saat ini status penyiapan dokumen teknis pemanfaatan BPM 2019 sudah selesai, sehingga proses pencairan dan pemanfaatan menunggu terbitnya SK Satker/PPK PIP kabupaten. Realisasi kegiatan pada tahapan kegiatan Persiapan, Perencanaan dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat. Dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel : QS Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU TA. 2019, Propinsi Sulawesi Tengah.**

| KEGIATAN   | TOTAL KELURAHAN | REALISASI TOTAL |               |         |          |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------|----------|
|  |                 | BELUM (kel.)    | PROSES (kel.) | SELESAI |          |
|  |                 |                 |               | (kel.)  | (persen) |
| QS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SKALA LINGKUNGAN                            |                 |                 |               |         |          |
| <b>A. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN</b>  |                 |                 |               |         |          |
| 1. Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan)                 | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 2. Seleksi Kegiatan Prioritas  | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 3. Konsultasi dan sosialisasi dengan Pemda/Instansi Terkait dan Masyarakat | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 4. Identifikasi Dampak dan rencana pengelolaan                             | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 5. Pemaketan pekerjaan   | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 6. Pembentukan KSM/panitia   | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 7. Pembentukan/ Revitalisasi KPP   | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 8. Survei teknis/lokasi  | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |



| KEGIATAN  | TOTAL KELURAHAN | REALISASI TOTAL |               |         |          |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------|----------|
|   |                 | BELUM (kel.)    | PROSES (kel.) | SELESAI |          |
|   |                 |                 |               | (kel.)  | (persen) |
| 9. Survei harga satuan Upah/material/alat   | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 10. Kesepakatan harga dan Swadaya   | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 11. Penyusunan DED,RAB,RKS dan jadwal   | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 12. Verifikasi oleh Askot infra   | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 13. Penandatanganan SPK BKM dengan PPK  | 3               | 1               | 2             | 0       | 0,00%    |
| 14. Pemberkasan Pencairan Tahp 1  | 3               | 1               | 2             | 0       | 0,00%    |
| 15. Penyusunan Rencana Kerja KSM  | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 16. Verifikasi Rencana Kerja KSM oleh Faskel teknik dan UPL                       | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| <b>JUMLAH KEGIATAN PERSIAPAN DAN PERENCANAAN</b>                                  |                 |                 |               |         |          |
| <b>B. PELAKSANAAN</b>   |                 |                 |               |         |          |
| 17. Penandatanganan SPPDL KSM dengan BKM  | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 18. Pelaksanaan MP2K untuk seluruh Paket Pekerjaan                                | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 19. Penyaluran Tahap 1 dari BKM ke KSM  | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 20. Pelaksanaan OJT   | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 21. Penyaluran Tahap 2 dari BKM ke KSM  | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 22. Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia  | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 23. Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana                    | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 24. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. KSM/Panitia kepada BKM | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 25. Serah terima pekerjaan BKM ke PPK Satker                                      | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 26. Serah terima pengelolaan kepada Pemerintahan kelurahan/desa                   | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| <b>JUMLAH KEGIATAN PELAKSANAAN</b>  |                 |                 |               |         |          |
| <b>C. PENCAIRAN BPM TAHAP 1</b>   |                 |                 |               |         |          |
| 27. Pemberkasan Di Tingkat BKM  | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 28. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Korkot / Askot                           | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 29. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat OC / OSP                                 | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |





| KEGIATAN  | TOTAL KELURAHAN | REALISASI TOTAL |               |         |          |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------|----------|
|   |                 | BELUM (kel.)    | PROSES (kel.) | SELESAI |          |
|   |                 |                 |               | (kel.)  | (persen) |
| 30. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Satker         | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 31. Penerbitan SPM                                      | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 32. Entri Kedalam Aplikasi Emon                         | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 33. Penerbitan SP2D                                     | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 34. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Online             | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| <b>JUMLAH PENCAIRAN BPM TAHAP 1</b>                     |                 |                 |               |         |          |
| <b>D. PENCAIRAN BPM TAHAP 2</b>                         |                 |                 |               |         |          |
| 35. Pemberkasan Di Tingkat BKM                          | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 36. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Korkot / Askot | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 37. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat OC / OSP       | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 38. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Satker         | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 39. Penerbitan SPM                                      | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 40. Entri Kedalam Aplikasi Emon                         | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 41. Penerbitan SP2D                                     | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 42. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Online             | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| <b>JUMLAH PENCAIRAN BPM TAHAP 1</b>                     |                 |                 |               |         |          |
| <b>E. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT</b>              |                 |                 |               |         |          |
| 43. Pembentukan Panitia Pelatihan dan Sosialisasi       | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 44. Penyiapan Modul oleh Tim Korkot dan OC/OSP          | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 45. Penyusunan Proposal (Dok. Pemberkasan)              | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 46. Verifikasi dokumen oleh Fasilitator                 | 3               | 2               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 47. Verifikasi dokumen oleh Korkot/Askot                | 3               | 2               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 48. Verifikasi dokumen oleh OC/OSP                      | 3               | 3               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 49. Verifikasi dokumen oleh Satker                      | 3               | 3               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 50. Dana PKM masuk ke rekening BKM                      | 3               | 3               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 51. Pelatihan KSM Pelaksana Pembangunan                 | 3               | 0               | 0             | 3       | 100,00%  |
| 52. Pelatihan BKM/UPL                                   | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 53. Pelatihan Kades/Lurah                               | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |
| 54. Pelatihan Livelihood/Vocational                     | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |



| KEGIATAN                                      | TOTAL KELURAHAN | REALISASI TOTAL |               |         |          |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------|----------|
|   |                 | BELUM (kel.)    | PROSES (kel.) | SELESAI |          |
|   |                 |                 |               | (kel.)  | (persen) |
| 55. Pelatihan keterampilan/Sertifikasi tukang | 3               | 3               | 0             | 0       | 0,00%    |

Secara kuantitatif capaian diatas menunjukkan bahwa dari 3 lokasi BPM telah menyelesaikan tahapan persiapan dan Perencanaan pada kegiatan penyusunan DED di tingkat komunitas. Capaian tersebut perlu didalami dari sisi kualitas produk dokumen DED sehingga diperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penanganan kumuh sudah didasari oleh perencanaan masyarakat yang benar, didukung data yang lengkap, dan secara substansi cukup memadai untuk menjadi dokumen perencanaan dalam kegiatan penanganan kumuh.

Salah satu upaya untuk pemastian kualitas DED yang telah disusun masyarakat melalui fasilitasi tim pendamping, maka perlu dilakukan pemastian berjenjang yang harus dilakukan oleh KMP, OSP, hingga Tim Korkot melalui kajian lapangan (uji petik) yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran umum dari kualitas dokumen DED. Pelaksanaan uji petik ini juga dapat menjadi media untuk membangun kesepahaman tentang platform kolaborasi dalam penanganan kumuh, memperkuat peran pemerintah daerah sebagai nakhoda dalam penanganan kumuh, serta menyiapkan masyarakat dan lembaga komunitas dalam pelaksanaan penanganan kumuh.



## Tujuan Uji Petik

Tujuan umum kegiatan uji petik pada triwulan-2 tahun 2019 ini adalah :

1. untuk memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan KOTAKU pada tahap persiapan dan Perencanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan
2. Memastikan kegiatan-kegiatan persiapan maupun readiness criteria pelaksanaan BPM 2019 telah dipenuhi dan Memastikan kualitas dokumen perencanaan teknis yang telah disusun memenuhi standar teknis yg telah ditetapkan;
3. Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan persiapan
4. Memastikan Pemda telah mengidentifikasi gap infrastruktur dan penyelesaiannya dalam rangka penanganan kumuh kota/kab. dan Memastikan dukungan kolaborasi untuk penanganan kumh 2019 telah berjalan.

## Rekapitulasi Lokasi Uji Petik

### REKAPITULASI LOKASI UJI PETIK OSP-9 SULAWESI TENGAH PERIODE JANUARI - DESEMBER 2019

| NO       | KEGIATAN MONITORING                           | JML KOTA | JML KEL/DESA | Q-1 | Q-2           | Q-3           | Q-4           |
|----------|---|----------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Uji Petik Propinsi</b>                     |          |              |     |               |               |               |
| A.1.     | Uji Petik Provinsi ke Kota :                  | <b>2</b> |              |     |               |               |               |
|          | Kota Kumuh Non Skala Kawasan :                |          |              |     |               |               |               |
|          | Dari Kota Palu ke Kabupaten Poso              |          | 1 Kel        |     |               | <b>1 Kali</b> |               |
|          | Kota Palu ke Kabupaten Tolitoli               |          | 2 Kel        |     |               |               |               |
| A.2.     | Uji Petik Tematik Provinsi ke Kota :          |          |              |     |               |               |               |
|          | Kota Kumuh Non Skala Kawasan :                |          |              |     |               |               |               |
|          | Dari Kota Palu ke Kabupaten Tolitoli          |          | 2 Kel        |     |               |               | <b>1 Kali</b> |
|          | Dari Kota Palu ke Kabupaten Poso              |          | 1 Kel        |     |               |               | <b>1 Kali</b> |
| <b>B</b> | <b>Uji Petik Korkot :</b>                     | <b>2</b> |              |     |               |               |               |
|          | Uji Petik Korkot ke Kota Askot mandiri        |          |              |     |               |               |               |
|          | Kota Kumuh Non Skala Kawasan :                |          |              |     |               |               |               |
|          | Dari Kota Palu ke Kabupaten ToliToli dan Poso |          | 3 Kel        |     | <b>1 Kali</b> | <b>1 Kali</b> | <b>1 Kali</b> |

## B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Dalam Pelaksanaan Uji petik di lakukan melalui standar instrument yang terdiri dari instrument tingkat masyarakat dan instrument tingkat Kota/Kabupaten, selain itu di lakukan pula lembar periksa dokumen Perencanaan teknis dan Pemanfaatan BPM TA.201di dapatkan dari matriks Analisis. Hasil uji petik capaian pelaksanaan KOTAKU dan Disajikan dalam tabel berikut :

**Hasil Uji Petik Capaian Pelaksanaan KOTAKU**

| NO. | TOPIK                | CAPAIAN KUANTITATIF                                       | ISU/CATATAN LAPANGAN   | FAKTOR PENYEBAB   | REKOMENDASI   |
|-----|----------------------|---|--|---|---|
| 1   | Kegiatan Kelembagaan | Capaian hasil penilaian Kelembagaan masih <b>"KURANG"</b> | - Hasil Opini Audit adalah Unqualified Opinion (UO)  |   |   |
|     |                      |   | - Hasil penilaian kelembagaan Status Mandiri<br>- Penilaian kelembagaan BKM dilakukan sendiri oleh Pendamping  |   |   |
|     |                      |   | Pemilihan Anggota BKM terakhir pada tahun 2017. Di tingkat basis tidak dilakukan pemilihan sebagaimana mestinya, tetapi hanya disepakati bersama utusan untuk saling memilih ditingkat kelurahan<br>- Hasil perubahan struktur anggota BKM belum dicatatkan ulang pada Notaris | - Hal tersebut terjadi karena ketidapkahaman panitia dan warga tentang substansi pemilihan langsung tanpa aklamasi seperti yang telah dilakukan<br><br>- BKM belum memiliki dana untuk mencatatkan kembali ke Notaris atas perubahan struktur anggota BKM | - Untuk pemilihan berikutnya, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemilihan dari tingkat basis<br><br>- Harus dikomunikasi ke Pemda untuk dapat menganggarkan untuk pencatatan Notaris |



| NO. | TOPIK                             | CAPAIAN KUANTITATIF   | ISU/CATATAN LAPANGAN   | FAKTOR PENYEBAB  | REKOMENDASI  |
|-----|-----------------------------------|---|--|--|--|
|     |                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum kolaborasi hanya sebatas terbentuk, namun kegiatannya belum ada dan belum berjalan</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan masih kurang intens untuk mendorong kolaborasi termasuk strategi membangun kolaborasi</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penguatan kembali tentang strategi membangun kolaborasi tingkat kelurahan</li> </ul>  |
|     |                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan PKM tahun 2019 yang terlaksana adalah kegiatan pelatihan KSM dan kegiatan sosialisasi tingkat kelurahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendamping masih belum memahami secara utuh bagian dan materi/bahan yang disampaikan pada kegiatan khususnya kegiatan paket Sosialisasi.</li> <li>- Kegiatan sosialisasi tingkat kelurahan hanya dihadiri oleh 20 orang peserta dari minimal 45 orang peserta yang disyaratkan.</li> <li>- Sebelumnya telah dilakukan kegiatan sosialisasi tentang KOTAKU yang dibiayai secara swadaya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSP harus menyiapkan kembali bahan/acuan untuk kegiatan sosialisasi.</li> <li>- Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan kembali setelah melakukan review atas pelaksanaan sosialisasi sebelumnya.</li> <li>- Kegiatan sosialisasi sebelumnya dapat diperhitungkan kedalam SIM KOTAKU</li> </ul> |
| 2   | Akses Informasi dan Akuntabilitas | Capaian akses Informasi dan Akuntabilitas masih <b>"KURANG"</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di BKM belum ada buku registrasi pengaduan dan belum ada unit khusus untuk mengelola pengaduan</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang intensnya pendampingan untuk merealisasikan unit pengaduan yang dikelola oleh masyarakat melalui BKM</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera membentuk tim pengelola pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) di tingkat kelurahan</li> </ul>  |
|     |                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak mengetahui akses</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Media informasi berupa Papan informasi tidak</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera merealisasikan kegiatan media</li> </ul>   |



| NO. | TOPIK                               | CAPAIAN KUANTITATIF   | ISU/CATATAN LAPANGAN  | FAKTOR PENYEBAB  | REKOMENDASI   |
|-----|-------------------------------------|---|---|--|---|
|     |                                     |   | <p>untuk menyampaikan permasalahan</p> <p>- Rembug Warga Tahun 2018 dan penyusunan Rencana Kerja BKM tahun 2019 belum dilaksanakan</p>  | <p>tersedia di sekretariat BKM atau ditempat startegis lainnya sehingga nomor PIM tidak tersosialisasi</p> <p>- Pendamping tidak memahami bahwa kegiatan tersebut harus terus dilakukan setiap tahunnya tanpa harus menunggu instruksi dari Korkot ataupun OSP</p> | <p>warga dan memasukan informasi tentang nomor PIM</p> <p>- BKM dapat mengadakan media informasi berupa papan informasi menggunakan dana BOP BKM</p> <p>- Memasukan agenda kegiatan Rembug tahunan dan menyusun rencana kerja BKM tahun 2019 pada pertemuan-pertemuan berikutnya di BKM</p> |
| 3   | Kualitas dokumen perencanaan teknis | <p>Secara umum dokumen perencanaan sudah siap kecuali beberap hal:</p> <p>- Berita Acara Kesepakatan Swadaya belum tersedia pada rencana kerja KSM</p> <p>- Verifikasi kelayakan kegiatan dan Berita Acara Verifikasi</p> | <p>- Dokumen perencanaan sudah memuat gambar tentang peta lokasi, denah, potongan, detail termasuk gambar before-after untuk perubahan wajah kawasan</p> <p>- Kesepakatan swadaya belum dituangkan kedalam Beritata Acara termasuk verifikasi kelayakan usulan dan berita acaranya belum tersedia</p> | <p>- Dalam perhitungan RAB, jumlah anggaran dengan kegiatan yang dimaksud melebihi pagu anggaran yang tersedia</p>   | <p>- Segera melakukan konsolidasi kepada BKM dan KSM tentang anggaran kegiatan yang melebihi pagu anggaran dan disepakati bagian kegiatan mana yang dapat diswadyakan kembali oleh KSM. Hasil kesepakatan tersebut kemudian</p>   |



| NO. | TOPIK                              | CAPAIAN KUANTITATIF  | ISU/CATATAN LAPANGAN  | FAKTOR PENYEBAB  | REKOMENDASI  |
|-----|------------------------------------|--|---|--|--|
|     |                                    |  |   |  | dituangkan ke dalam Berita Acara.<br>- Tim pendamping segera menyiapkan lembaran hasil verifikasi usulan kegiatan dan berita acaranya  |
| 4   | Kualitas proses pencairan BPM 2019 | Capaian penilaian atas kualitas proses pencairan BPM masih <b>"KURANG"</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pengelolaan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) sudah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>- SPK antara BKM dan PPK belum dibuat</li> <li>- Pemberkasan BPM sbagian sudah disusun, namun bagian yang lain belum dapat dibuat</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPK dan pemberkasan BPM belum dibuat karena masih menunggu SK Satker/PPK yang dikeluarkan Direktur Bangkim kementerian PUPR belum ada</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendamping sudah harus menyiapkan dokumen lainnya yang tidak terkait dengan SK Satker/PPK misalnya Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh BKM dan dokumen lainnya.</li> </ul> |
| 5   | Kinerja pelaksanaan kolaborasi     | Capaian pelaksanaan Kolaborasi masih berada di level <b>"KURANG"</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan kolaborasi yang dilaksana dilokasi delineasi pada tahun 2018 berupa pekerjaan aspal jalan dan pembangunan pengelohan limbah tahun.</li> <li>- Forum kolaborasi tingkat kabupaten belum berjalan efektif, namun sudah ada gambaran dari beberapa OPD untuk berkontribusi pada lokasi pembangunan BPM 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dampingan KOTAKU yang hanya 4 kelurahan di kabupaten Poso menjadi alasan Pemda sehingga Pemda beranggapan bahwa kontribusi Program sangat sedikit</li> <li>- Belum berjalannya pertemuan rutin POKJA PKP dan pembahasaa persoalan tematik kumuh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat diperlukan pertemuan rutin dengan POKJA PKP tentang penanganan kumuh dan membahas isu kekumuhan serta strategi penanganannya</li> </ul>                            |
| 6   | Efektifitas kerja KPP              | Capaian efektifitas kerja  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Gebangrejo belum mendapatkan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok pemanfaatn dan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendamping wajib</li> </ul>   |



| NO. | TOPIK   | CAPAIAN KUANTITATIF  | ISU/CATATAN LAPANGAN   | FAKTOR PENYEBAB  | REKOMENDASI   |
|-----|---|--|--|--|---|
|     |   | KPP masih <b>"KURANG"</b>                                  | dana BDI/BPM sejak tahun 2017-2018<br>- KPP pada kegiatan BPM 2019 terbentuk di masing-masing kegiatan   | pemeilihara belum seutuhnya dipahami oleh para pelaku (Pendamping, BKM/UPL, KSM) | mempelajari kembali POS KPP.<br>- OSP akan melakukan coaching tentang KPP |
| 7   | Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan | Capaian kualitas data SIM berada pada level <b>"CUKUP"</b> | - Hasil Audit KAP dan penilaian kelembagaan BKM sudah sesuai dengan data SIM<br>- Kegiatan kolaborasi tingkat kelurahan di data SIM belum terinput |  |   |